

KOMUNIKASI POLITIK DALAM SENI BUDAYA DAN PERWAYANGAN PILKADA BREBES TAHUN 2024

Achmad Noval Arianto¹, Diryo Suparto², Didi Permadi³

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal
Email: achmadnoval069@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan seni pewayangan sebagai media kampanye politik calon bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, serta mengkaji efektivitas dan tantangan pewayangan dalam komunikasi politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana, melalui wawancara mendalam dengan dalang Ki Haryo Enthus Susmono, tim sukses, dan masyarakat audiens, serta observasi langsung pertunjukan wayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seni pewayangan efektif sebagai media kampanye politik, membangun kedekatan emosional antara calon bupati dan masyarakat, terutama di kalangan pemilih yang memiliki keterikatan budaya. Dalang berperan sebagai komunikator politik yang mengemas pesan kampanye secara simbolis dan menghibur. Namun, tantangan muncul dalam menjangkau generasi muda yang lebih tertarik pada media digital. Pewayangan memiliki potensi besar dalam membangun partisipasi politik masyarakat, tetapi perlu diintegrasikan dengan metode komunikasi modern untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Kata kunci: Pewayangan, Kampanye Politik, Komunikasi Politik, Dalang, Partisipasi Pemilih.

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of wayang (traditional Javanese shadow puppetry) as a political campaign medium for the Brebes regent candidate, Paramitha Widya Kusuma, and to examine its effectiveness and challenges in political communication. The research employs a qualitative approach with discourse analysis, using in-depth interviews with puppeteer Ki Haryo Enthus Susmono, campaign team members, and audience members, as well as direct observation of wayang performances. Findings indicate that wayang is an effective campaign medium, fostering emotional connections between the candidate and the community -especially among voters with strong cultural ties. The puppeteer functions as a political communicator, delivering campaign messages in a symbolic and entertaining way. However, challenges arise in reaching younger generations who are more engaged with digital media. Wayang holds significant potential in encouraging public political participation, but needs to be integrated with modern communication methods to reach a broader audience.

Keywords: Wayang, Political Campaign, Political Communication, Puppeteer, Voter Participation.

Pendahuluan

Demokrasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin melalui pemilihan secara langsung. Sistem ini menjadi landasan bagi berlangsungnya Pilkada di Indonesia sebagai bagian dari mekanisme politik local (Akhmad et al., 2023). Pilkada bukan sekadar ajang kompetisi politik, tetapi juga mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan daerah. Proses ini tidak terlepas dari strategi kampanye yang dijalankan oleh calon kepala daerah untuk menarik perhatian pemilih. Berbagai metode komunikasi politik digunakan, baik melalui media massa, digital, maupun pendekatan berbasis budaya (Dwitama et al., 2022).

Komunikasi politik berbasis budaya merupakan pendekatan strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai, simbol, dan tradisi lokal sebagai medium penyampaian pesan

politik untuk menciptakan resonansi yang lebih dalam dengan identitas komunitas. Pendekatan ini berbeda dari komunikasi politik konvensional karena memanfaatkan sistem makna yang sudah tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat, sehingga pesan dapat diterima secara lebih natural dan autentik. Dalam peta komunikasi politik kontemporer, seni tradisi seperti pewayangan menempati posisi unik sebagai jembatan antara diskursus politik modern dan kearifan lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Pewayangan tidak hanya berfungsi sebagai kanal alternatif di tengah dominasi media digital, tetapi juga sebagai ruang dialogis yang memungkinkan partisipasi aktif audiens dalam interpretasi pesan politik. Posisi strategis ini menjadikan seni tradisi sebagai instrumen komunikasi politik yang mampu mengatasi hambatan komunikasi lintas generasi dan strata sosial dalam konteks demokrasi local (Yogaswara & Subekti, 2021).

Pendekatan berbasis budaya semakin sering digunakan dalam strategi kampanye politik, terutama pada wilayah yang memiliki tradisi kuat. Budaya menjadi faktor penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai sosial dan politik. Masyarakat Jawa memiliki seni pewayangan sebagai salah satu bentuk budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Seni ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media penyampaian pesan moral dan social (Yasa, 2022). Simbolisme dalam pewayangan memungkinkan berbagai gagasan, termasuk politik, disampaikan dengan cara yang lebih halus dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

Seni pewayangan telah lama menjadi bagian dari komunikasi sosial dan politik di masyarakat Jawa. Dalang memainkan peran sentral dalam pertunjukan wayang, karena kemampuannya dalam menyampaikan cerita yang mengandung kritik sosial dan pesan moral. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pewayangan menjadi sarana komunikasi politik yang efektif dalam menyampaikan gagasan kepada masyarakat (Fathurrijal et al., 2024). Metode ini dianggap lebih dapat diterima dibandingkan kampanye secara langsung yang sering kali bersifat persuasif secara eksplisit.

Pemilihan kepala daerah di Brebes pada tahun tertentu menampilkan penggunaan seni pewayangan sebagai strategi kampanye politik. Calon bupati, Paramitha Widya Kusuma, memanfaatkan seni pewayangan untuk menyampaikan pesan politiknya. Pendekatan ini dianggap strategis karena mempertimbangkan karakteristik budaya masyarakat setempat. Penggunaan pewayangan dalam kampanye politik memberikan nuansa yang lebih dekat dengan masyarakat dan dapat membangun keterikatan emosional antara calon pemimpin dan pemilih (Ramadhanisa, 2025).

Ki Haryo Enthus Susmono memiliki peran penting dalam kampanye politik Paramitha Widya Kusuma. Sebagai seorang dalang ternama, ia dikenal karena kemampuannya dalam menyampaikan cerita dengan gaya yang khas dan mudah diterima oleh berbagai kalangan (Naila & Hidayat-Sardini, 2022). Keberadaannya dalam kampanye politik menunjukkan bahwa pewayangan bukan sekadar hiburan, tetapi juga alat komunikasi politik yang mampu mempengaruhi opini public (Naila & Hidayat, 2022). Kehadiran dalang dengan popularitas tinggi memberikan legitimasi tambahan terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh calon kepala daerah. Komunikasi politik melalui seni pewayangan dapat dianalisis menggunakan pendekatan semiotika. Setiap elemen dalam pertunjukan wayang memiliki makna yang dapat diinterpretasikan dalam berbagai konteks, termasuk politik (Ramadhanisa, 2025). Tokoh

wayang, dialog, hingga alur cerita sering kali menggambarkan situasi sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat (Syamsudin & Maulana, 2024). Simbol-simbol yang ada dalam pertunjukan wayang memiliki makna yang mendalam dan dapat menjadi alat untuk membentuk persepsi politik Masyarakat (Senopati & Wicaksandita, 2023).

Dalam konteks inovasi politik melalui kesenian rakyat, dalang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai penghibur atau penyampai cerita tradisional, melainkan berevolusi menjadi komunikator simbolik yang memiliki kapasitas untuk membentuk opini publik secara strategis. Posisi dalang sebagai aktor politik informal memungkinkan mereka untuk menyampaikan kritik sosial, visi kepemimpinan, dan agenda politik melalui narasi yang dikemas dalam simbol-simbol budaya yang familiar bagi masyarakat. Keunikan dalang sebagai komunikator simbolik terletak pada kemampuannya untuk menciptakan ruang negosiasi makna, dimana pesan politik dapat diinterpretasikan secara beragam oleh audiens tanpa kehilangan esensi komunikatifnya. Inovasi ini menunjukkan bahwa pewayangan tidak hanya mengadaptasi teknologi modern dalam pertunjukannya, tetapi juga mentransformasi dirinya menjadi platform komunikasi politik yang dinamis dan responsif terhadap isu-isu kontemporer (Dwitama et al., 2022). Fenomena ini menghadirkan dimensi baru dalam studi komunikasi politik, dimana seni tradisional menjadi medium inovatif untuk artikulasi kepentingan politik dalam masyarakat demokratis.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji peran budaya dalam komunikasi politik, sebagian besar penelitian masih terfokus pada penggunaan media massa konvensional dan digital sebagai saluran utama penyampaian pesan politik. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menganalisis strategi komunikasi politik dari perspektif modern tanpa mempertimbangkan secara mendalam bagaimana seni tradisional dapat menjadi medium yang efektif dalam kontestasi politik lokal (Fathurrijal et al., 2024). Kajian tentang pewayangan dalam konteks politik masih terbatas pada analisis simbolisme dan makna filosofis, namun belum mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana seni ini beroperasi sebagai kanal komunikasi politik yang dinamis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman tentang peran seni tradisional sebagai strategi komunikasi politik yang adaptif dan kontekstual (Budianto & Ghanistyana, 2024).

Keterbatasan studi terdahulu juga terlihat pada kurangnya eksplorasi mendalam tentang mekanisme transmisi pesan politik melalui pertunjukan wayang dalam konteks pemilihan kepala daerah. Penelitian yang ada umumnya bersifat deskriptif dan belum menganalisis secara sistematis bagaimana elemen-elemen pewayangan seperti tokoh, alur cerita, dan gaya penyampaian dalang dapat mempengaruhi persepsi dan preferensi politik masyarakat. Selain itu, studi tentang efektivitas pewayangan sebagai media kampanye politik masih sangat terbatas, terutama dalam mengukur dampaknya terhadap perilaku pemilih di tingkat local (Paramartha et al., 2022). Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum memberikan kerangka analisis yang memadai untuk memahami bagaimana tradisi lokal dapat diintegrasikan dengan strategi komunikasi politik modern. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penelitian yang lebih komprehensif tentang dinamika komunikasi politik berbasis seni tradisional (Alamsyah et al., 2024).

Salah satu aspek penting dari komunikasi politik adalah bagaimana pesan politik disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Falah (2023) menekankan bahwa komunikasi

politik tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk citra kandidat di mata pemilih. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amir (2022), yang menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi politik yang baik dapat mempengaruhi khalayak secara signifikan. Dalam konteks ini, penggunaan seni pewayangan oleh Paramitha Widya Kusuma sebagai media untuk menyampaikan pesan politiknya dapat dilihat sebagai strategi yang inovatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Selain itu, Arpandi (2023) menunjukkan bahwa media online memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dalam era digital saat ini, penggunaan platform media sosial dan konten kreatif seperti seni pewayangan dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik perhatian pemilih, terutama generasi muda.

Hal ini juga diungkapkan oleh Kurniawan dan Mutiah (2022), yang menekankan pentingnya strategi komunikasi dalam mengumpulkan suara, di mana media sosial menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menentukan pilihan pemilih. Namun, tantangan dalam komunikasi politik juga perlu diperhatikan. Perkasa (2023) mengungkapkan bahwa politisasi agama dan konflik sosial dapat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Dalam konteks ini, penting bagi calon pemimpin seperti Paramitha untuk menyampaikan pesan yang inklusif dan tidak memecah belah masyarakat. Penelitian oleh Falah (2023) juga menunjukkan bahwa citra kandidat dapat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengelola komunikasi politik mereka, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif.

Dalam konteks Pilkada Brebes 2024, penggunaan seni pewayangan oleh Paramitha Widya Kusuma melalui Ki Haryo Enthus Susmono menghadirkan fenomena yang belum banyak dikaji secara akademis. Studi yang menganalisis secara spesifik bagaimana pewayangan digunakan sebagai strategi kampanye dalam kontestasi politik lokal masih sangat jarang ditemukan. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana seni pewayangan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau media penyampaian nilai moral, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi politik yang strategis dan efektif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika komunikasi politik berbasis budaya lokal. Analisis mendalam terhadap kasus Pilkada Brebes dapat menjadi model untuk memahami fenomena serupa di daerah lain yang memiliki tradisi budaya kuat.

Kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam mengenai peran budaya dalam komunikasi politik. Seni pewayangan sebagai alat komunikasi politik tidak hanya mencerminkan strategi kampanye, tetapi juga menggambarkan bagaimana tradisi lokal dapat beradaptasi dengan dinamika politik modern. Analisis terhadap pemanfaatan pewayangan dalam kampanye politik diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi komunikasi politik berbasis budaya yang lebih efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana untuk mengkaji pesan politik dalam seni pewayangan pada kampanye calon bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma. Data utama diperoleh dari dokumentasi pertunjukan wayang dan wawancara mendalam dengan calon bupati, dalang, dan masyarakat audiens. Wawancara dengan calon bupati bertujuan memahami strategi komunikasi politik dan pemilihan seni pewayangan

sebagai media kampanye. Dalang memberikan perspektif tentang pengemasan elemen pertunjukan untuk menyampaikan pesan politik, sementara wawancara dengan masyarakat berfokus pada pemahaman mereka terhadap pesan yang disampaikan. Hasil wawancara dan analisis wacana dibandingkan untuk mengidentifikasi pola komunikasi dan dampaknya terhadap persepsi politik masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Seni pewayangan, sebagai salah satu warisan budaya yang kaya, memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dalam konteks politik, seni ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Dengan memanfaatkan kekayaan budaya ini, para calon pemimpin dapat menjalin kedekatan emosional dengan masyarakat, serta menyampaikan nilai-nilai sosial dan politik dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.

Dalam kajian ini, kita akan membahas bagaimana seni pewayangan digunakan sebagai media kampanye politik di Brebes, dengan fokus pada strategi yang diterapkan oleh calon bupati Paramitha Widya Kusuma. Melalui pertunjukan wayang, pesan politik dapat disampaikan dengan cara yang menghibur dan mendidik, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, kita juga akan mengeksplorasi peran dalang dalam membangun narasi politik dan tantangan yang dihadapi dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda.

Seni Pewayangan sebagai Media Kampanye Politik di Brebes

Seni pewayangan merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Selain sebagai hiburan, pewayangan juga berfungsi sebagai media edukasi dan penyampaian nilai-nilai sosial serta politik. Dalam konteks politik lokal, pewayangan kerap dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang efektif, terutama di daerah yang memiliki keterikatan kuat dengan budaya Jawa. Penggunaan seni tradisional dalam kampanye politik dinilai dapat menciptakan hubungan emosional yang lebih erat antara calon pemimpin dan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Brebes, seni pewayangan dimanfaatkan sebagai salah satu strategi kampanye politik oleh calon bupati Paramitha Widya Kusuma. Kampanye berbasis budaya ini menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat Brebes yang memiliki tradisi wayang kuat, terutama dalam komunitas Jawa Ngapak dan Jawa Sunda. Dalang ternama Ki Haryo Enthus Susmono berperan sebagai penggerak utama dalam menyampaikan pesan politik melalui pertunjukan wayang.

Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa pewayangan sebagai media kampanye mendapat respons yang beragam dari berbagai pihak. Masyarakat mengapresiasi pendekatan ini karena lebih menghibur dibandingkan kampanye konvensional. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga, pewayangan membuat politik terasa lebih dekat dengan rakyat. Penyampaian narasumber "Bagus, karena wayang sudah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat. Ini bisa membuat politik lebih dekat dengan rakyat."

Namun, ada juga pandangan bahwa efektivitas pewayangan dalam kampanye sangat bergantung pada bagaimana pesan politik disampaikan dalam cerita wayang. Jika terlalu

simbolis, pesan bisa sulit dipahami oleh semua kalangan. Narasumber menyampaikan "Jika disampaikan dengan cara yang sederhana dan tidak terlalu banyak simbolisme, maka bisa mudah dipahami." Sementara itu, dari sudut pandang dalang, penggunaan seni pewayangan dalam kampanye bukan sekadar alat politik, tetapi juga bagian dari upaya pelestarian budaya. Ki Haryo Enthus Susmono menegaskan bahwa wayang bukan hanya tontonan, tetapi juga tuntunan yang dapat menyampaikan pesan politik secara halus dan tidak menggurui. Penyampaian narasumber "Wayang tetap relevan sebagai alat komunikasi politik karena bukan sekadar tontonan, tetapi juga tuntunan. Melalui pewayangan, pesan politik dapat disampaikan secara halus melalui percakapan antar tokoh tanpa terkesan menggurui."

Dari sudut pandang tim sukses (Anis Sulfahmi), strategi ini dinilai berhasil menarik perhatian masyarakat, terutama di daerah yang memiliki kedekatan dengan budaya wayang. Pagelaran wayang juga memberikan suasana yang lebih cair dalam kampanye, sehingga calon bupati bisa berinteraksi langsung dengan pemilih tanpa terkesan formal. "*Pertunjukan wayang ini menjadi semacam 'healing' dari aktivitas kampanye yang padat. Kehadiran wayang dalam kampanye menciptakan suasana yang lebih akrab dan cair antara pemimpin dan rakyatnya.*"

Meskipun demikian, ada tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam menjangkau generasi muda. Sebagian besar penikmat wayang berasal dari kalangan usia di atas 30 tahun, sementara pemilih pemula cenderung lebih tertarik pada kampanye berbasis digital. Narasumber menyampaikan "Tantangan terbesar adalah keterbatasan daya tarik wayang bagi pemilih dari generasi Z atau pemilih pemula. Saat ini, wayang tidak termasuk dalam tren yang digemari generasi muda atau bersifat FOMO (*Fear of Missing Out*)."

Secara keseluruhan, seni pewayangan sebagai media kampanye politik di Brebes memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam membangun kedekatan dengan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterikatan budaya dengan wayang. Namun, agar dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, strategi ini perlu diimbangi dengan pendekatan komunikasi lainnya, seperti kampanye digital dan dialog langsung dengan pemilih (Anshori et al., 2021).

Namun, untuk meningkatkan efektivitas kampanye, penting untuk menggabungkan pendekatan seni dengan strategi komunikasi yang lebih modern, seperti penggunaan kampanye digital. Penelitian oleh Majid menyebutkan transformasi dalam strategi komunikasi politik di era digital, di mana interaksi antara kandidat dan pemilih semakin banyak dilakukan melalui media sosial dan *platform* online (Majid, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan yang dicatat oleh Khalyubi et al. (2021) yang menunjukkan bahwa kampanye berbasis media sosial sudah terbukti efektif dalam menggalang dukungan dalam pemilihan sebelumnya. Mengombinasikan seni pewayangan dengan kampanye digital dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, yang dapat memperkuat pengaruh kandidat di Brebes.

Analisis komparatif antara kampanye berbasis budaya dan media modern menunjukkan keunggulan kompetitif pewayangan dalam menciptakan engagement yang lebih mendalam dengan audiens. Berbeda dengan kampanye digital yang cenderung bersifat satu arah dan mengutamakan jangkauan massal, pewayangan menawarkan pengalaman komunikasi yang lebih personal dan dialogis, dimana audiens dapat berinteraksi langsung dengan dalang selama pertunjukan (Budianto & Ghanistyana, 2024). Studi menunjukkan bahwa media tradisional seperti pewayangan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan media sosial,

terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional (Ruslan, 2008). Keunggulan lain dari kampanye berbasis budaya adalah kemampuannya untuk menciptakan keterikatan emosional yang mendalam melalui shared cultural memory, yang sulit dicapai oleh kampanye digital yang sering kali bersifat impersonal. Namun, tantangan utama kampanye berbasis budaya terletak pada jangkauan yang terbatas dan memerlukan investasi waktu yang lebih intensif dibandingkan dengan kampanye digital yang dapat menjangkau audiens dalam skala yang lebih luas secara simultan (Liliana et al., 2023).

Peran Dalang dalam Membangun Narasi Politik melalui Wayang

Dalang memiliki peran sentral dalam pertunjukan wayang, tidak hanya sebagai pencerita tetapi juga sebagai komunikator yang mampu menyampaikan berbagai pesan, termasuk politik. Dalam budaya Jawa, dalang dianggap sebagai sosok yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, dalang sering menjadi perantara dalam menyampaikan kritik sosial serta membentuk opini publik melalui pertunjukan wayang. Dalam konteks kampanye politik, peran dalang menjadi semakin penting karena mereka bertugas mengemas pesan politik ke dalam narasi yang dapat diterima oleh masyarakat secara lebih halus dan menghibur.

Dalam kampanye politik calon bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dalang Ki Haryo Enthus Susmono berperan sebagai aktor utama dalam menyampaikan pesan politik melalui pertunjukan wayang. Sebagai seorang dalang yang sudah dikenal luas, Ki Haryo memiliki kemampuan untuk meramu cerita yang tidak hanya menarik, tetapi juga relevan dengan isu politik yang sedang berlangsung. Dalam wawancara, Ki Haryo menjelaskan bahwa dalam menyusun narasi politik, ia selalu melakukan riset terlebih dahulu mengenai calon yang didukung, termasuk rekam jejak dan program kerjanya. "Dalam menyusun cerita wayang dengan pesan politik, langkah pertama yang dilakukan adalah mengkaji profil calon bupati, termasuk rekam jejak, prestasi, serta keunggulan yang dimiliki. Selain itu, isu-isu yang berkembang di masyarakat juga menjadi pertimbangan utama agar pesan yang disampaikan relevan."

Ki Haryo juga menegaskan bahwa penting bagi dalang untuk tetap mempertahankan unsur seni dan budaya dalam setiap pertunjukan, meskipun mengandung muatan politik. Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara unsur hiburan dan pesan politik agar tidak terkesan seperti propaganda yang terlalu kaku. *"Tantangan utamanya adalah menjaga esensi dan ruh pewayangan agar tetap sesuai dengan pakem aslinya. Dalam pertunjukan, tetap digunakan wayang dengan gaya khas Tegal-Brebes tanpa menghilangkan karakter asli punokawan seperti Lubi dan Slenteng."*

Dari perspektif tim sukses (Anis Sulfahmi), peran dalang sangat krusial dalam membangun citra politik calon. Dengan pendekatan yang tidak langsung, dalang dapat menyampaikan visi dan misi calon secara lebih menarik dan tidak terasa menggurui. "Dalang memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk narasi politik. Sebagai sosok yang memahami karakter masyarakat dan target audiens, dalang dapat mengemas pesan kampanye dalam bentuk cerita yang relevan dan menarik."

Sementara itu, masyarakat memberikan respons yang beragam terhadap peran dalang dalam membawakan narasi politik. Ada yang merasa bahwa pendekatan ini efektif karena membuat politik lebih ringan dan mudah diterima. Namun, ada juga yang merasa bahwa efektivitas narasi politik dalam wayang sangat tergantung pada bagaimana cerita dikembangkan. Jika terlalu banyak menggunakan simbolisme atau bahasa yang sulit dipahami, pesan politiknya bisa tidak sampai kepada semua lapisan masyarakat.

Komunikasi politik yang efektif melalui pertunjukan wayang adalah tentang bagaimana dalang dapat menyampaikan pesan-pesan tersebut secara halus dan menghibur, sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Kemampuan untuk menyampaikan pesan yang jelas dan menarik adalah salah satu kunci dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap isu-isu politik (Bentiyan, 2024). Oleh karena itu, dalang dituntut untuk memiliki keahlian tidak hanya dalam seni panggung, tetapi juga dalam memahami konteks politik dan sosial yang ada, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap jelas dan dapat dipahami oleh audiens yang beragam. Lebih lanjut, peran budaya dalam komunikasi politik tidak bisa diabaikan (Kahpi et al., 2024).

Wayang sebagai bentuk seni tradisional mampu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berdialog mengenai isu-isu penting dengan cara yang santai, tetapi tetap mendidik. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dalang tidak hanya sekadar penghibur, tetapi juga pelaku komunikasi politik yang strategis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa seni tradisional dapat berfungsi sebagai alat yang kuat dalam penyampaian pesan politik yang dapat membawa perubahan sosial yang positif (Falah, 2023). Dengan memanfaatkan bentuk seni seperti wayang, dalang dapat membantu membuka dialog tentang isu-isu sosial yang penting, mengajak penonton untuk berpikir kritis, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam proses politik.

Transformasi peran dalang dalam konteks politik kontemporer menunjukkan evolusi dari sekadar penghibur menjadi komunikator simbolik yang memiliki kapasitas strategis dalam membentuk opini publik. Ki Haryo Enthus Susmono tidak hanya menyampaikan pesan politik Paramitha Widya Kusuma, tetapi juga berperan sebagai aktor politik informal yang mampu mengkonstruksi narasi kepemimpinan melalui simbolisme wayang. Inovasi ini terlihat dari kemampuan dalang untuk mengadaptasi isu-isu politik kontemporer ke dalam alur cerita tradisional, menciptakan ruang negosiasi makna dimana audiens dapat menginterpretasikan pesan secara beragam tanpa kehilangan esensi komunikatifnya. Keunikan dalang sebagai komunikator simbolik terletak pada otoritasnya yang berasal dari tradisi budaya, bukan dari struktur politik formal, sehingga legitimasi pesan yang disampaikan memiliki basis yang berbeda dari komunikator politik konvensional. Fenomena ini menunjukkan bahwa pewayangan telah bertransformasi menjadi platform komunikasi politik yang inovatif dan responsif terhadap dinamika demokrasi lokal (Putr et al., 2021).

Konteks sosial budaya Brebes dengan identitas Jawa Ngapak dan tradisi Islam kultural menjadi faktor determinan yang mempengaruhi penerimaan dan efektivitas pesan politik melalui pewayangan. Masyarakat Brebes yang memiliki karakteristik budaya hibrida antara tradisi Jawa dan pengaruh Islam kultural menciptakan ruang yang kondusif bagi pewayangan sebagai medium komunikasi politik yang dapat mengakomodasi nilai-nilai religius dan kearifan lokal secara simultan. Dialek Jawa Ngapak yang digunakan dalam pertunjukan wayang

menciptakan kedekatan psikologis antara dalang dan audiens, sehingga pesan politik dapat disampaikan dengan lebih otentik dan mudah diterima oleh masyarakat setempat. Struktur sosial masyarakat Brebes yang masih menghargai figur tokoh spiritual dan budaya memberikan legitimasi tambahan terhadap dalang sebagai komunikator politik, sehingga pesan yang disampaikan memiliki kredibilitas yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pewayangan sebagai strategi kampanye tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya lokal yang menjadi fondasi penerimaan masyarakat terhadap medium komunikasi tradisional (Asriati et al., 2022).

Secara keseluruhan, dalang memainkan peran kunci dalam membentuk dan menyampaikan narasi politik melalui wayang. Dengan pendekatan yang lebih halus dan berbasis budaya, pesan politik dapat diterima oleh masyarakat dengan cara yang lebih santai dan menghibur. Namun, agar lebih efektif, dalang juga perlu memastikan bahwa pesan yang disampaikan tetap jelas dan dapat dipahami oleh semua kalangan.

Efektivitas dan Tantangan Pewayangan dalam Komunikasi Politik

Seni pewayangan telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa, tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai media komunikasi sosial dan politik. Dalam konteks kampanye politik, penggunaan pewayangan sebagai alat komunikasi memiliki efektivitas tersendiri, terutama dalam membangun kedekatan antara calon pemimpin dan masyarakat. Pendekatan berbasis budaya ini dianggap lebih dapat diterima dibandingkan metode kampanye konvensional yang sering kali terkesan formal dan persuasif secara langsung. Namun, di balik efektivitasnya, pewayangan sebagai alat komunikasi politik juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau kelompok pemilih yang lebih luas (Naila & Hidayat-Sardini, 2022).

Efektivitas kampanye berbasis budaya seperti pewayangan perlu dipahami dalam konteks perbandingan dengan media kampanye modern untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitifnya dalam mempengaruhi persepsi pemilih. Berbeda dengan kampanye digital yang cenderung bersifat satu arah dan mengutamakan jangkauan massal, pewayangan menawarkan pengalaman komunikasi yang lebih personal dan dialogis, dimana audiens dapat berinteraksi langsung dengan dalang selama pertunjukan. Studi menunjukkan bahwa media tradisional seperti pewayangan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan media sosial, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional (Yogaswara & Subekti, 2021.). Keunggulan lain dari kampanye berbasis budaya adalah kemampuannya untuk menciptakan keterikatan emosional yang mendalam melalui *shared cultural memory*, yang sulit dicapai oleh kampanye digital yang sering kali bersifat impersonal. Namun, tantangan utama kampanye berbasis budaya terletak pada jangkauan yang terbatas dan memerlukan investasi waktu yang lebih intensif dibandingkan dengan kampanye digital yang dapat menjangkau audiens dalam skala yang lebih luas secara simultan (Arifin, 2011).

Dalam kampanye politik calon bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, seni pewayangan menjadi salah satu strategi utama dalam menyampaikan pesan politik. Pertunjukan wayang tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tetapi juga menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menjelaskan visi dan misi calon dalam format yang lebih ringan dan menghibur. Seperti yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang menonton pertunjukan. Selain aspek

hiburan, pewayangan juga dinilai mampu menciptakan hubungan emosional antara pemilih dan calon pemimpin. Dengan hadir secara langsung dalam pertunjukan dan berinteraksi dengan masyarakat, calon bupati dapat membangun kedekatan yang sulit dicapai melalui metode kampanye lainnya.

Namun, meskipun pewayangan memiliki efektivitas dalam menarik perhatian masyarakat, ada tantangan besar dalam memastikan bahwa pesan politik yang disampaikan dapat dipahami oleh semua kalangan. Beberapa responden menyatakan bahwa bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan wayang, pesan yang disampaikan bisa sulit ditangkap. Tantangan lainnya adalah daya tarik pewayangan yang cenderung lebih kuat di kalangan masyarakat usia di atas 30 tahun. Generasi muda, terutama pemilih pemula, lebih tertarik pada kampanye berbasis media digital yang lebih cepat dan interaktif. Saat ini, wayang tidak termasuk dalam tren yang digemari generasi muda atau bersifat *FOMO (Fear of Missing Out)*." Gambar 1 menunjukkan suasana bagaimana penulis dengan dalang.



Sumber: Hasil penelitian

Gambar 1. Wawancara Dengan Dalang

Dari perspektif dalang, pewayangan tetap menjadi alat komunikasi politik yang relevan, tetapi perlu ada penyesuaian agar tetap menarik bagi berbagai kelompok usia. Dalang Ki Haryo Enthus Susmono menekankan bahwa wayang memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan politik dengan cara yang lebih halus dan menghindari kesan menggurui. Namun, efektivitas pewayangan juga dipengaruhi oleh cara penyampaiannya. Jika terlalu banyak menggunakan simbolisme, ada kemungkinan audiens tidak menangkap pesan yang ingin disampaikan.

Dalam meningkatkan efektivitas pewayangan dalam kampanye politik, penting untuk mengimbangkan pendekatan ini dengan strategi komunikasi lainnya. Dalam konteks digital, media sosial dan kampanye digital telah menjadi saluran utama untuk menjangkau pemilih, khususnya generasi muda (Zalzillah & Gumelar, 2024). Menurut suatu penelitian, penggunaan media sosial dalam kampanye dapat memfasilitasi interaksi yang lebih dinamis antara kandidat dan pemilih, memungkinkan konstituen untuk lebih mudah menyalurkan aspirasi politik mereka (Supit & Wuryanta, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pewayangan dan teknologi komunikasi modern dapat memperluas jangkauan dan dampak pesan politik.

Sintesis hasil wawancara dengan berbagai aktor menunjukkan konvergensi pandangan tentang efektivitas pewayangan sebagai medium komunikasi politik, meskipun dengan perspektif yang berbeda. Tim sukses Paramitha melihat pewayangan sebagai strategi untuk menjangkau pemilih tradisional yang sulit dijangkau melalui media digital, sementara dalang memosisikan diri sebagai mediator yang menjembatani kepentingan politik dengan nilai-nilai

budaya masyarakat. Masyarakat sebagai audiens menunjukkan apresiasi terhadap pendekatan kampanye yang menghargai tradisi lokal, namun tetap kritis terhadap muatan politik yang terlalu eksplisit dalam pertunjukan. Perbandingan perspektif ini mengungkapkan bahwa pewayangan beroperasi dalam ruang yang kompleks, dimana kepentingan politik, artistik, dan budaya bernegosiasi untuk mencapai keseimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak (Latief, 2000). Temuan ini memperkuat argumen bahwa pewayangan sebagai medium komunikasi politik memerlukan sensitifitas budaya yang tinggi untuk mempertahankan legitimasi dan efektivitasnya dalam konteks demokrasi local (Muhtadi, 2008).

Secara keseluruhan, pewayangan terbukti memiliki efektivitas dalam kampanye politik, terutama dalam membangun kedekatan dengan masyarakat dan menyampaikan pesan politik secara lebih santai. Namun, untuk meningkatkan daya jangkau, strategi ini perlu diimbangi dengan pendekatan komunikasi lainnya, seperti kampanye digital dan dialog langsung, agar dapat menjangkau kelompok pemilih yang lebih luas, khususnya generasi muda.

Simpulan

Penggunaan seni pewayangan dalam kampanye politik di Brebes terbukti efektif dalam membangun kedekatan emosional antara calon pemimpin dan masyarakat, di mana peran dalang sebagai penyampai narasi politik menjadi sangat penting dalam mengemas pesan kampanye secara santai dan mudah diterima dibandingkan metode konvensional. Meskipun strategi ini mampu menarik perhatian serta memperkuat citra calon, tantangan tetap muncul dalam menjangkau pemilih muda yang lebih akrab dengan media digital, sehingga dibutuhkan integrasi dengan metode komunikasi modern seperti *platform* digital dan media sosial agar pesan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa menghilangkan nilai budaya dan esensi pewayangan itu sendiri. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori komunikasi politik berbasis budaya dengan menyoroti bahwa media tradisional dapat menjadi ruang hibridasi antara diskursus politik modern dan kearifan lokal, serta memperkenalkan konsep “komunikator simbolik” yang memperkaya pemahaman tentang peran aktor non-politik, di mana legitimasi pesan bersumber dari otoritas budaya dan spiritual yang diakui masyarakat, bukan dari struktur kekuasaan formal. Secara teoritis, penelitian ini menantang dikotomi antara tradisi dan modernitas dalam komunikasi politik dengan menunjukkan bahwa keduanya dapat bersinergi dalam demokrasi lokal, sedangkan secara praktis, hasil ini menawarkan blueprint strategi kampanye berbasis kearifan lokal yang adaptif terhadap karakteristik budaya daerah. Model pewayangan sebagai sarana komunikasi politik dapat dijadikan rujukan untuk merancang kampanye yang lebih kontekstual, sensitif terhadap nilai sosial budaya setempat, dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui media yang akrab, sementara efektivitas dalang sebagai komunikator simbolik memberikan wawasan penting bagi tim kampanye untuk melibatkan tokoh budaya lokal sebagai *endorser* yang lebih otentik dibandingkan dengan celebrity endorsement konvensional.

Referensi

Akhmad, Z., Thamrin, U., & Santosa, R. (2023). Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMK Negeri 5 Kabupaten Bulukumba. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 202–216.

- Alamsyah, I. L., Aulya, N., & Satriya, S. H. (2024). Transformasi media dan dinamika komunikasi dalam era digital: Tantangan dan peluang ilmu komunikasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 168–181.
- Amir, S. (2022). Perencanaan Komunikasi Politik Ali Ibrahim Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tidore Kepulauan. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 308–318.
- Anshori, A., Rudianto, R., Adhani, A., & Nasution, N. (2021). Pengaruh Relasi Budaya dalam Pesan dan Saluran Politik terhadap Sikap Pemilih: Studi Kasus di Pilkada Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan*, 22(2), 177–188.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-TujuanStrategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Graha Ilmu.
- Arpandi, A. (2023). Media Online dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 843–855.
- Asriati, M., Lubis, L. A., & Ginting, R. (2022). Strategi Komunikasi Politik Calon Legislator Perempuan pada Kampanye Pemilihan Legislatif 2019 di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. *Komunika*, 18(2), 36–45.
- Bentayan, R. (2024). Analisis gaya komunikasi politik calon presiden Prabowo Subianto menjelang pemilihan presiden 2024. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1572–1581.
- Budianto, R. O., & Ghanistyana, L. P. (2024). Peran komunikasi politik dalam kampanye isu lingkungan: Studi kasus pada kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 2(1), 11.
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022a). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 53–66.
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022b). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 53–66.
- Falah, Z. (2023). Peran komunikasi politik dalam membentuk citra kandidat pemilu. *Syntax Idea*, 5(9), 1867–1876.
- Fathurrijal, F., Ishanan, I., Yusron, Y., & Suhadah, S. (2024). Strategi Komunikasi Politik Kpud Lombok Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 7(2), 179–196.
- Kahpi, M. L., Siregar, A. S., & Romadhon, S. (2024). Dinamika komunikasi politik Islam: Narasi, dan dampak dalam konteks politik kontemporer. *Hikmah*, 18(1), 1–20.
- Khalyubi, W., Bangun, C. D., Ardiyansyah, F., & Romadhona, M. R. (2021). Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye dan partisipasi digital dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2020. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 87–102.
- Kurniawan, F., & Mutiah, T. (2022). Menentukan capres dan cawapres 2024 melalui penggunaan media sosial. *Global Komunika*, 5(2), 65–73.
- Latief, M. S. (2000). *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*. Media Pressindo.
- Liliana, K. I., Hartanto, D. D., & Maer, B. D. A. (2023). KAMPANYE SOSIAL “DIBÉBÉRKÉ” SEBAGAI UPAYA PENGENALAN KESENIAN WAYANG BEBER KEPADA GENERASI MUDA DI KOTA SURAKARTA. *Share: Journal of Service Learning*, 9(2), 97–108.
- Majid, N. (2023). Strategi komunikasi politik dalam pemilihan umum di era digital. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 53–61.
- Muhtadi, A. S. (2008). *Kampanye Politik*. Humaniora.
- Naila, A. H., & Hidayat-Sardini, N. (2022). KEKUASAAN BERPIHAK ALA ENTHUS SUSMONO. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(1), 447–463.

- Paramartha, A., Riyanto, B., & Aji, H. K. (2022). Strategi Wayang Kampung Sebelah Dalam Menyampaikan Pesan Kritik Sosial Pada Warga Siwal Baki. *Solidaritas*, 6(2).
- Perkasa, A. W. A. P. (2023). Konflik Sosial berupa Politisasi Agama sebagai Sisi Gelap Politik Indonesia. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(1), 81–100.
- Putr, D. P. A. S., Segara, I. N. Y., & Sutarya, I. G. (2021). JARGON POLITIK AGAMA DAN BUDAYA PASANGAN CALON KOSTER-ACE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR BALI 2018. *ANUBHAVA: Jurnal Ilmu Komunikasi Hindu*, 1(1), 71–81.
- Ramadhanisa, A. , & J. R. (2025). *KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELALUI PERTUNJUKAN WAYANG GOLEK PADA PILKADA 2024*. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- Ruslan, R. (2008). *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation*. Raja Grafindo Persada.
- Senopati, I. G. A. B., & Wicaksandita, I. D. K. (2023). Wayang Bali dan Aktivisme Sosial: Studi Kasus Retorika Dan Wayang Sampah Daur Ulang Dalam Teaser Sinematografi Pahayu Gumine. *Jurnal Damar Pedalangan*, 3(2), 113–125.
- Supit, G. R. A., & Wuryanta, A. E. W. (2021). Media sosial sebagai media politik dalam pilkada (Studi kasus pemanfaatan media sosial dalam pilkada kabupaten sukabumi 2020). *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 6(3), 314.
- Syamsudin, O. R., & Maulana, H. (2024). Memaknai Indaprasta sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan (Kajian Semiotis terhadap Cerita Wayang Babad Alas Wanamarta). *Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(2), 296–302.
- Yasa, I. M. A. (2022). Nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam pagelaran Wayang Kulit pada Tumpek Wayang. *Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(01), 39–50.
- Yogaswara, Y. S., & Subekti, P. (n.d.). Pengelolaan Kampanye Politik Pasangan Sabdaguna Melalui Pagelaran Wayang Golek dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Periode 2016-2021. *Jurnal Kehumasan ISSN*, 2655, 1551.
- Zalzillah, L. N., & Gumelar, R. G. (2024). Kontribusi Media Digital dalam Membangun Opini Publik Pemilu 2024 (Studi Kasus Narasi Newsroom). *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 6(1), 49–60.